

Modul

01

PDGK4405
Edisi 2

Paradigma Pendidikan IPS

Prof.Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A.
Drs. Ojat Darajat, M.Bus.

Daftar Isi Modul

Modul 01	1.1
Paradigma Pendidikan IPS	
Kegiatan Belajar 1	1.5
Konsep dan Rasional "Social Studies"	
Latihan	1.12
Rangkuman	1.13
Tes Formatif 1	1.14
Kegiatan Belajar 2	1.17
Paradigma Pendidikan IPS	
Latihan	1.33
Rangkuman	1.34
Tes Formatif 2	1.35
Kunci Jawaban	1.38
Tes Formatif	
Daftar Pustaka	1.39



Pendahuluan

Kenyataan menunjukkan bahwa program (pendidikan) Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS), dan Pendidikan Disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial (PDIPS) telah menjadi bagian dari wacana kurikulum, sistem pendidikan Indonesia.

Secara kelembagaan, IIS dikelola dan dibina di fakultas-fakultas keilmuan sosial dan humaniora murni, yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM), Fakultas Geografi (FG), Fakultas Psikologi (FP), dan Fakultas Sastra (FS). IIS yang dikelola dan dibina di semua fakultas tersebut mencakup pendidikan ilmu geografi, ilmu sejarah, antropologi, sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hukum, ilmu komunikasi, dan psikologi. Masing-masing program pendidikan ini bertujuan menghasilkan ilmuwan sosial dalam berbagai tingkat, yakni sarjana, magister, dan doktor, dan atau praktisi atau profesional dalam lingkup bidang ilmunya dalam berbagai tingkat seperti tenaga ahli madya (administrasi, komunikasi), notaris, akuntan, dan jurnalis (UNPAD, 1998; UGM, 1998; UI, 1998).

Sedangkan PIPS merupakan program pendidikan sosial pada jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah yang mencakup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), IPS terpadu di Sekolah Dasar (SD) dan Paket A Luar Sekolah; IPS terkorelasi di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Paket B Luar Sekolah, yang di dalamnya mencakup materi geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi, dan IPS terpisah di Sekolah Menengah Umum (SMU) yang terdiri atas mata pelajaran geografi, sejarah, antropologi, sosiologi, ekonomi, dan tata negara. Tujuan utama program pendidikan tersebut adalah menyiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik dan memberi dasar pengetahuan dalam masing-masing bidangnya untuk kelanjutan pendidikan jenjang di atasnya (Depdikbud, 1994; 1984; 1975). Secara kelembagaan, program pendidikan ini dikelola dan dibina oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah beserta satuan pengelola pendidikan di bawahnya sampai ke daerah, dan lembaga-lembaga pendidikan persekolahannya

Sementara itu, PDIPS pada dasarnya merupakan program pendidikan guru IPS yang dikelola dan dibina di Fakultas Pendidikan IPS Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (KIP), dan di Jurusan Pendidikan IPS Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) suatu universitas. Tujuan utama program ini adalah menghasilkan guru IPS dan PPKN yang pada dasarnya menguasai konsep-konsep esensial ilmu-ilmu sosial dan materi disiplin ilmu lainnya yang terkait, dan mampu membelajarkan peserta didiknya secara bermakna. Oleh karena itu, para mahasiswa program pendidikan ini antara lain dituntut untuk mempelajari kelompok tiga kelompok program kurikuler, yakni kelompok mata keilmuan sosial dalam rangka pembelajaran IPS, teknologi pembelajaran IPS, dan kurikulum serta pembelajaran IPS persekolahan (IKIP Bandung, 1997; IKIP Jakarta, 1997; dan Universitas Terbuka, 1997).

Modul ini merupakan pengantar bagi para guru IPS agar memahami lebih jauh dan selanjutnya dapat menjelaskan Konsep Pengajaran IPS sebagai suatu bidang yang memusatkan perhatian pada berbagai masalah konseptual mengenai ketiga kelompok program kurikuler tersebut. Konten dari ketiga kelompok mata kuliah tersebut perlu dilihat secara konseptual sebagai suatu sistem pengetahuan terpadu dalam rangka pengembangan kemampuan, kepribadian, dan kewenangan guru IPS dan PPKN. Untuk itulah dalam modul ini selanjutnya akan dibahas hal-hal pokok sebagai berikut.

1. Konsep dan rasional *Social Studies* secara umum.
2. Paradigma pendidikan IPS di Indonesia.

Konsep dan Rasional “*Social Studies*”

Kegiatan Belajar 1

Untuk melihat, bagaimana konsep *social studies* secara umum, nampaknya perlu dikembalikan kepada perkembangan pemikiran dan praksis dalam bidang itu di Amerika Serikat (AS) yang penulis anggap sebagai salah satu negara yang telah menunjukkan reputasi akademis dalam bidang itu. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu, seperti dapat disimak dari berbagai karya akademis yang dipublikasikan oleh *National Council for the Social Studies* (NCSS) sejak pertemuan organisasi tersebut pertama kalinya tanggal 20-30 November 1935 sampai sekarang. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa “ilmu sosial sebagai inti dari suatu kurikulum”, dengan kerangka pemikiran yang belum solid, yang oleh Longstreet (1965:356) digambarkan sebagai pertemuan yang penuh dengan kebingungan dan dengan refleksi pemikiran yang tidak jelas sebagai dampak dari perdebatan intelektual yang tak terselesaikan, di tengah-tengah situasi sosial, politik, dan ekonomi yang penuh gejolak. Namun demikian, terkuak harapan pada satu saat dapat dicapai suatu hasil yang gemilang di dalam “social studies”.

Pilar *historis-epistemologis*, *social studies* yang pertama, berupa suatu definisi tentang “social studies” telah dipancarkan oleh Edgar Bruce Wesley pada tahun 1937 (Barr, Barth, dan Shermis, 1977:1-2), yaitu *The Social Studies are the social sciences simplified pedagogical purposes*. Maksudnya, bahwa studi sosial adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Pengertian ini, kemudian dibakukan dalam *The United States of Education’s Standard Terminology for Curriculum and Instruction* (dalam Barr dan kawan-kawan, 1977:2) sebagai berikut: *The social studies comprised of those aspects of history, economics, political science, sociology, anthropology, psychology, geography, and philosophy which in practice are selected for purposes in schools and colleges*. Maksudnya, bahwa *social studies* berisikan aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat, yang dipilih untuk tujuan pembelajaran sekolah dan di perguruan tinggi.

Bila dianalisis dengan cermat, di dalam pengertian awal studi sosial tersebut di atas menyiratkan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, studi sosial merupakan disiplin dari ilmu-ilmu sosial. *Kedua*, disiplin ini dikembangkan untuk memenuhi tujuan pendidikan/pembelajaran, baik pada tingkat persekolahan maupun tingkat pendidikan tinggi. *Ketiga*, oleh karenanya, aspek-aspek dari masing-masing disiplin ilmu sosial itu perlu diseleksi sesuai dengan tujuan tersebut.

Walaupun telah ada definisi awal sebagai pilar pertama, di dalam perkembangan selanjutnya ternyata bidang studi sosial ini didera oleh berbagai ketidakmenentuan, yang oleh pionir studi sosial Edgar Bruce Wesley (Barr dan kawan-kawan, 1978: iv) berdasarkan pengamatannya selama 40-an tahun dikemukakan bahwa bidang ilmu studi sosial telah lama mengalami ketidaksepahaman dalam pendefinisian serta kebingungan dalam falsafahnya. Keadaan itu dinilai telah menimbulkan ketidakmenentuan, ketidakberkeputusan, ketidakbersatuan, dan ketidakmajuan. Keadaan tersebut dirasakan terutama pada masa tahun 1940-1970-an.

Pada periode tersebut, seperti digambarkan oleh Barr, Barth, dan Shermis, (1977:33-46), studi sosial menjalani periode yang sangat sulit. Antara tahun 1940-1950-an ia mendapat serangan hampir dari segala penjuru, yang pada dasarnya, berkisar pada pertanyaan mesti atau tidaknya "*social studies*" menanamkan nilai dan sikap demokratis kepada para pemuda. Hal itu tumbuh sebagai salah satu dampak dari perang yang berkepanjangan, yang melahirkan tuntutan bagi sekolah untuk mengajarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis. Tuntutan tersebut telah mendorong munculnya upaya pemberian tekanan pada pentingnya pengajaran sejarah, berupa fakta-fakta sejarah yang perlu mendapat perhatian; kelembagaan pemerintahan Amerika; dan analisis rinci mengenai Konstitusi Amerika. Situasi pembelajarannya kelihatan sangat kuat menekankan pada mata pelajaran sosial yang terpisah-pisah, memorisasi informasi faktual, dan transmisi secara tidak kritis dari nilai-nilai budaya terpilih.

Pada tahun 1960-an, timbul suatu gerakan akademis yang mendasar dalam pendidikan, yang secara khusus dapat dipandang sebagai suatu revolusi dalam studi sosial yang dipelopori oleh para sejarawan dan ahli-ahli ilmu sosial. Kedua kelompok ilmuwan tersebut terpikat oleh "*social studies*", antara lain karena pada saat itu pemerintah Federal menyediakan dana yang sangat besar untuk pengembangan kurikulum. Dengan dukungan dana tersebut, para ahli dari berbagai disiplin bekerja sama untuk mengembangkan proyek kurikulum dan memproduksi bahan belajar yang sangat inovatif dan menantang dalam skala besar. Gerakan akademis tersebut dikenal sebagai gerakan "era baru studi sosial (*the new social studies*)".

Namun demikian, sampai tahun 1970-an ternyata gagasan untuk mendapatkan *the new social studies* ini belum menjadi kenyataan. Isu yang terus menerus studi sosial sampai pada saat itu adalah mengenai perlu tidaknya indoktrinasi, tujuan pembelajaran yang saling bertentangan, dan pertikaian mengenai isi pembelajaran.

Yang sangat menonjol terjadi pada tahun 1940-1960, demikian ditegaskan oleh Barr, dan kawan-kawan (1977:36) adalah terjadinya tarik-menarik antara dua visi studi sosial. Di satu pihak, adanya gerakan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial untuk tujuan pendidikan kewarganegaraan yang terus bergulir sampai mencapai tahap yang lebih canggih. Di lain pihak, terus bergulirnya gerakan pemisahan berbagai disiplin ilmu sosial yang cenderung memperlemah konsepsi pendidikan studi sosial. Hal tersebut antara lain merupakan dampak dari berbagai penelitian yang dirancang untuk mempengaruhi kurikulum sekolah, terutama yang berkenaan dengan pengertian dan

sikap siswa. Selain itu, hal tersebut juga merupakan dampak dari opini publik berkaitan dengan Perang Dunia II, Perang Dingin, dan Perang Korea, serta kritik publik terhadap belum terwujudnya gagasan John Dewey tentang pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam praktik pendidikan persekolahan.

Sesungguhnya pada tahun 1955 terjadi terobosan yang besar, demikian diungkapkan oleh Barr, dan kawan-kawan (1977:37) berupa inovasi Maurice Hunc dan Lawrence Metcalf yang mencoba melihat cara baru dalam pengintegrasian pengetahuan dan keterampilan ilmu sosial untuk tujuan pendidikan kewarganegaraan. Dikemukakan bahwa program studi sosial di sekolah seyogianya diorganisasikan bukan dalam bentuk pembelajaran ilmu sosial yang terpisah-pisah, tetapi diorientasikan kepada “closed areas” atau masalah-masalah yang tabu dalam masyarakat, seperti isu tentang seks, patriotisme, ras, dan lain-lain yang biasanya penuh dengan prasangka, ketidaktahuan, mitos, dan kontroversi, untuk diubah ke arah yang bersifat refleksi rasional. Dengan cara itu, “social studies” mulai diarahkan kepada upaya guna melatih para siswa untuk dapat mengambil keputusan mengenai masalah-masalah publik. Disiplin ilmu sosial diakui sangat berguna dalam memberikan fakta yang benar dan teori serta prinsip yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kecenderungan “social studies” untuk melatih keterampilan *reflective thinking* ini, demikian ditekankan oleh Barr, dan kawan-kawan (1977:37) diperkuat oleh gagasan Shirley Engle yang pada tahun 1960 yang secara mendasar dan tegas merefleksikan gagasan John Dewey tentang pendidikan berpikir kritis.

Tekanan perubahan lain yang juga cukup dahsyat muncul pada tahun 1957 dalam bentuk upaya komprehensif untuk mereformasi “social studies” yang menjadi pemicu dan pemacu perubahan tersebut adalah keberhasilan Rusia meluncurkan pesawat ruang angkasa Sputnik yang telah membuat Amerika panik dan merasa jauh tertinggal dari Rusia, dan dipublikasikannya hasil penelitian dua orang dosen Purdue University, H.H. Rommela dan D.H. Radlor yang dikenal dengan Purdue Opinion Poll. Penelitian dengan sampel anak usia sekolah ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, hanya 35% dari pemuda yang percaya bahwa surat kabar perlu diizinkan untuk menerbitkan apa saja yang diinginkannya; kedua, sebesar 34% percaya bahwa pemerintah perlu melarang sebagian orang untuk berbicara; ketiga, sebesar 26% percaya bahwa polisi perlu diizinkan untuk menggeledah rumah seseorang tanpa jaminan; keempat, sebesar 25% merasakan bahwa beberapa kelompok tidak perlu diizinkan mengadakan pertemuan. Hasil penelitian ini dinilai merupakan salah satu petunjuk kegagalan studi sosial yang pada saat itu memang masih bersifat berbasis materi (*content*) dan dengan dominasi pendekatan *expository* dan sekaligus memberi indikasi perlunya perubahan pembelajaran studi sosial menjadi pembelajaran yang terintegrasi, refleksi, dan berbasis masalah. (Barr dkk., 41-42). Kesemua itu telah memperkuat munculnya era baru studi sosial.

Gerakan studi sosial yang baru yang menjadi pilar dari perkembangan studi sosial pada tahun 1960-an, bertolak dari kesimpulan bahwa studi sosial sebelumnya dinilai sangat tidak efektif dalam mengajarkan substansi dan mempengaruhi perubahan siswa.

Oleh karena itu, para ilmuwan, dalam hal ini sejarawan dan ahli-ahli ilmu sosial bersatu padu untuk bergerak meningkatkan studi sosial kepada taraf mempelajari ilmu sosial secara mendasar (Barr dkk., 1977). Dengan orientasi tersebut maka dimulailah era modus pembelajaran pendidikan ilmu sosial.

Gerakan tersebut dipacu lebih kuat oleh pemikiran Jerome Bruner dalam bukunya *The Process of Education* yang dengan tegas berargumentasi bahwa setiap pokok bahasan dapat diajarkan secara efektif kepada setiap anak pada setiap tahapan perkembangannya. Pandangan ini sangat mempengaruhi pikiran dan sikap para sejarawan dan ahli ilmu sosial, dan mereka berargumentasi bahwa konsep, generalisasi, teori, dan prosedur, serta model akademik dapat diajarkan kepada anak dari berbagai disiplin tingkat usia sekolah.

Atas dasar postulat tersebut, pada akhirnya para ahli sejarawan, ahli ilmu sosial, dan pendidik sepakat untuk melakukan reformasi studi sosial dengan menggunakan cara yang berbeda dari sebelumnya. Pendekatan tersebut adalah dengan melalui proses pengembangan kurikulum. Sekelompok pendidik, ahli psikolog dan ahli ilmu sosial secara bersama-sama mengembangkan bahan belajar berdasarkan temuan penelitian dan teori belajar, kemudian diujicobakan di lapangan, selanjutnya direvisi, dan pada akhirnya disebarluaskan untuk digunakan secara luas dalam dunia persekolahan. Pada era itu, tercatat lebih dari 50 proyek pengembangan kurikulum dan bahan belajar studi sosial, termasuk di dalamnya proyek yang mencoba merintis pengintegrasian studi sosial untuk tujuan pendidikan kewarganegaraan.

Dari berbagai penelitian tersebut, demikian direkam oleh Barr, dkk. (1977:43-44) para ahli menemukan bahwa ternyata betapa sukarnya mengoperasionalkan teori Bruner tersebut. Setiap disiplin adalah unik dan seyogianya diajarkan secara terpisah. Pandangan ini terus bergulir dan seterusnya mendorong timbulnya upaya mentransformasikan studi sosial ke dalam ilmu sosial dan mengajarkannya sebagai disiplin akademik yang terpisah. Gerakan inilah yang mendorong, berdirinya Konsorsium Pendidikan Ilmu Sosial *The Social Science Education Consortium (SSEC)*, yang kemudian menerbitkan bukunya yang pertama *Concepts and Structures in the New Social Studies Curriculum*. Para pakar SSEC sepakat bahwa struktur disiplin akademik memiliki dua komponen, yakni konsep-konsep dasar dan generalisasi dari suatu disiplin dan metode, prosedur, yang diperlukan untuk mengembangkan dan merevisi keseluruhan konsep-konsep dasar tersebut. Hal ini mengimplikasi pada bahan belajar studi sosial yang harus dirancang untuk membelajarkan siswa guna menguasai konsep dan metode *inquiri* yang digunakan para sejarawan dan pakar ilmu sosial untuk membangun ilmu pengetahuan (Barr dkk., 1977).

Pada dasawarsa 1970-an, demikian direkam oleh Barr, dan kawan-kawan (1977:46) terjadi pertumbuhan studi sosial yang serupa dengan perkembangan sebelumnya dengan hasilnya hampir semua proyek kurikulum menitikberatkan pada proses *inquiri*, pengambilan keputusan, klarifikasi nilai, dan masalah-masalah yang berorientasi pada siswa. Namun demikian, hasil studi mengenai kurikulum dan pembelajaran studi sosial tersebut ternyata sangat mengejutkan. Para ahli ternyata mendapatkan kesimpulan yang sama yakni, terlepas dari upaya terbaik dari para pendidik dan besarnya biaya yang

dikeluarkan pemerintah, ternyata belum banyak terjadi perubahan di sekolah (Barr dkk.,1977)

Perkembangan selanjutnya, yakni antara tahun 1976-1983, seperti dilaporkan oleh Stanley (1965:310) pendidikan sosial merupakan suatu bidang yang memiliki beragam definisi dan rasional. Hal tersebut memang sejalan dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh Wesley (Barr, dkk.,1976) yang telah mencatat penggunaan istilah studi sosial sebagai ilmu sosial, layanan publik, *socialism*, radikal, reformasi sosial, kurikulum yang terintegrasi dan lain-lain. Terlepas dari adanya aneka penggunaan pengertian tersebut, ditegaskan bahwa jantung dari studi sosial adalah hubungan atau interaksi antar manusia. Sedangkan jika dilihat dari visi, misi dan strateginya, Barr dkk. (1978:17-19) studi sosial telah dan dapat dikembangkan dalam tiga tradisi, yakni studi sosial diajarkan sebagai pendidikan kewarganegaraan (*citizenship transmmission*), studi sosial diajarkan sebagai ilmu sosial, dan studi sosial yang diajarkan sebagai *reflective inquiry*. Sedangkan definisi yang diajukannya adalah sebagai berikut.

“studi sosial adalah integrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk kepentingan pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan. *Social Studies is an integration of social sciences and humanities for the purposes of instruction in citizenship education*” (Barr dkk., 1978:18).

Definisi studi sosial dan pengidentifikasian studi sosial atas tiga tradisi pedagogis di atas dapat dianggap sebagai pilar utama dari studi sosial pada dasawarsa 1970-an. Dalam definisi tersebut tersirat dan tersurat beberapa hal. *Pertama*, studi sosial merupakan suatu sistem pengetahuan terpadu; *kedua*, misi utama studi sosial adalah pendidikan kewarganegaraan dalam suatu masyarakat yang demokratis; *ketiga*, sumber utama *contents* studi sosial adalah ilmu-ilmu sosial dan humaniora; *keempat*, dalam upaya penyiapan warga negara yang demokratis terbuka kemungkinan perbedaan dalam orientasi, visi, tujuan, dan metode pembelajaran.

Pada dasawarsa 1980-an perkembangan “social studies” ditandai oleh lahirnya dua pilar akademis, yakni *Report of the National Council for the Social Studies Task Force on Scope and Sequence*” berjudul “*In search of A Scope and Sequence for Social Studies* (NCSS:1983), dan *A report of the Curriculum Task Force of the National Commission on Social Studies in the Schools*” yang berjudul “*Charting A Course: Social Studies for 21st Century* (NCSS:1989). Laporan pertama menghasilkan definisi, tujuan, lingkup, dan iritan materi mulai dari Taman Kanak-Kanak (*Kindergarten*) sampai dengan kelas XII (*High School*).

Jika dilihat dari definisi dan tujuannya, studi sosial menurut laporan tersebut menyiratkan dan menyuratkan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, “social studies” merupakan mata pelajaran dasar di seluruh jenjang pendidikan persekolahan; *kedua*, tujuan utama mata pelajaran ini ialah mengembangkan siswa untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang memadai untuk berperan serta dalam kehidupan demokrasi; *Ketiga*, *contents* pelajarannya digali dan diseleksi dari sejarah dari ilmu-ilmu sosial, serta dalam banyak hal dari humaniora dan

sains; dan *keempat*, pembelajarannya menggunakan cara-cara yang mencerminkan kesadaran pribadi kemasyarakatan, pengalaman budaya, dan perkembangan pribadi siswa. Kesemua itu, mencerminkan visi, misi, dan strategi yang senapas dengan apa yang telah diajukan oleh Barr, dan kawan-kawan (1978). Hal tersebut sekaligus mencerminkan bahwa pada dasawarsa 1980-an telah terjadi kristalisasi lebih pemikiran studi sosial yang lebih solid dan telah mencairnya masalah ketidakmenentuan, ketidakberkeputusan, ketidakbersatuan, dan ketidakmajuan yang menandai perkembangan studi sosial pada 4-5 dasawarsa sebelumnya.

Di dalam laporan NCSS yang kedua, "*Charting A Course*" nampak jelas upaya untuk mempertegas visi, misi dan strategi studi sosial dalam laporan NCSS yang pertama ruang lingkup dan urutan. Menurut laporan tersebut, untuk abad ke-21, kurikulum studi sosial seyogianya memiliki ciri-ciri menitikberatkan pada peran warga negara pada masyarakat yang demokrasi; memberikan pengetahuan yang kumulatif dan konsisten mulai dari TK sampai dengan kelas 12; menuntut sejarah dan geografi menyiapkan kerangka pengembangan bagi studi sosial; memusatkan kurikulum bukan hanya pada "major civilization and societies"; mengembangkan jaringan keterkaitan ilmu sosial dengan humaniora dan ilmu pengetahuan alam; menempatkan *contents* untuk tidak diperlakukan sebagai hal yang harus diterima dan diingat; menuntut penerapan proses pembelajaran interaktif, seperti menulis, melakukan pengamatan, debat, simulasi atau bermain peran, bekerja dengan data statistik, menggunakan kemampuan berpikir kritis; memanfaatkan (media dan sumber belajar; pemberian dukungan dari seluruh jajaran pengelola pendidikan dan menempatkan *essential knowledge* dalam pembelajaran di setiap jenjang pendidikan persekolahan.

Jika dilihat dari karakteristik dan tujuannya, pendidikan studi sosial yang dipikirkan untuk abad ke-21 masih tetap menempatkan pendidikan kewarganegaraan, yakni pengembangan warga negara yang bertanggung jawab dan berpartisipasi secara aktif sebagai salah satu esensinya selain esensi pengembangan kemampuan sosial yang berkenaan dengan visi tentang pengalaman hidupnya, pemahaman kritis terhadap ilmu-ilmu sosial, pemahaman tentang manusia dalam konteks persatuan di dalam perbedaan, dan analisis kritis terhadap keadaan kehidupan manusia. Hal ini mengandung arti lebih memantapkan pemikiran yang telah mengkristal sebelumnya, sebagaimana telah dikemukakan dalam dokumen NCSS mengenai *Scope and Sequence for the Social Studies* (NCSS:1983).

Bagaimanakah perkembangan pemikiran mengenai *social studies* selanjutnya?

Pada tahun 1992, *the Board of Directors of the National Council for the Social Studies* mengadopsi visi terbaru mengenai *social studies*, yang kemudian diterbitkan dalam dokumen resmi NCSS pada tahun 1994 dengan judul *Expectations of Excellence: Curriculum Standards for Social Studies*. Dokumen ini nampaknya yang sedang mewarnai pemikiran dan praksis studi sosial di Amerika Serikat sampai dengan saat ini. Di dalam dokumen tersebut, secara esensial mengandung visi, misi, dan strategi pendidikan studi sosial, yang mengokohkan kristalisasi pemikiran yang lebih solid dan kohesif dari para pakar dan praktisi yang tergabung dalam NCSS, yang secara sosial

akademik sangat berpengaruh di Amerika Serikat, yang juga biasanya memberi dampak yang signifikan terhadap pemikiran dan praksis dalam bidang itu di negara lain. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir, 1980 dan 1990-an, pemikiran mengenai studi sosial yang sebelumnya dilanda penyakit ketidakmenentuan, ketidakberkeputusan, ketidakbersatuan, dan ketidakmajuan, seperti telah dibahas pada awal bab ini, paling tidak secara konseptual telah dapat diatasi. Hal ini, penulis pikir, merupakan suatu kemajuan besar dalam epistemologi disiplin pendidikan studi sosial. Dengan demikian pula, dapat diperkirakan bahwa pemikiran tersebut akan banyak mewarnai pemikiran dan praksis pendidikan studi sosial di Amerika Serikat dan negara lainnya pada dasawarsa awal abad ke-21.

Sebagai rambu-rambu dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi baru studi sosial tersebut, NCSS (1994) menggariskan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, program studi sosial mempunyai tujuan pokok membangun warga negara yang kompeten, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan oleh anak didik agar mampu berperan serta dalam kehidupan yang demokratis (NCSS,1994:3). Di sini, kembali ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan, yang secara tersurat dikatakan sebagai pengembangan warga negara yang kompeten atau kemampuan sebagai warga negara yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat berperan serta dalam kehidupan demokrasi. Walaupun demikian, ditegaskan bahwa pengembangan warga negara yang kompeten itu bukanlah hanya menjadi tanggung jawab dari studi sosial. Yang dimaksudkan adalah, bahwa esensi tujuan tersebut lebih diutamakan dalam studi sosial daripada dalam bidang lain.

Kedua, program studi sosial dalam dunia pendidikan persekolahan, mulai dari pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan pendidikan menengah, ditandai oleh keterpaduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap di dalam dan antardisiplin (NCSS, 1994:3). Hal ini, memberi dasar bahwa pendidikan studi sosial memiliki dua alternatif, yakni yang bersifat monodisipliner dan multidisipliner. Pada kelas-kelas rendah, ditekankan pula studi sosial yang mengintegrasikan beberapa disiplin yang bertolak dari suatu tema tertentu, misalnya tema waktu dan perubahan yang memungkinkan guru mengembangkan pengalaman belajar siswa yang melibatkan disiplin sejarah, sains, dan bahasa. Pada kelas-kelas lanjutan dan menengah, program studi sosial dapat diteruskan dengan pengintegrasian secara interdisipliner yang lebih luas; atau dengan menempatkan suatu disiplin sebagai titik tolak, kemudian dikaitkan dengan atau diperkaya dari materi disiplin lainnya, yang sering disebut lintas disiplin. Karena itu, pendekatan monodisipliner yang dimungkinkan bukanlah dalam arti pembelajaran suatu disiplin sosial secara soliter, misalnya hanya sejarah atau geografi saja. Hal itu dapat dipahami karena fenomena dan masalah sosial dalam kenyataannya. tidak bisa dipisahkan, misalnya antara pemanasan global, timbulnya *el nino* dan *la nina*, perubahan musim (dimensi geografi), produktivitas pertanian, tingkat pendapatan petani, dan tingkat kesejahteraan (dimensi ekonomi), serta perlindungan hukum (dimensi politik).

Ketiga, program studi sosial dititikberatkan pada upaya membantu siswa dalam membangun pengetahuan. Di sini, siswa diperankan bukan sebagai penerima

pengetahuan yang pasif, tetapi sebagai pembangun pengetahuan dan sikap yang aktif melalui cara pandang secara akademik terhadap realita. Nampaknya, pandangan *konstruktivisme* yang menitikberatkan pada proses mengetahui akan menjadi salah satu pilar dari studi sosial pada abad ke-21 tersebut, menggeser pandangan *behaviorisme* yang mengasumsikan pengetahuan ada di luar diri manusia dan menempatkan siswa sebagai penerima dari pengetahuan.

Keempat, program pengetahuan dari studi sosial mencerminkan perubahan alami dari pengetahuan, membantu pengembangan beragam pendekatan yang baru dan terintegrasi untuk memecahkan isu-isu penting bagi manusia (NCSS, 1994). Dengan begitu, hakikat pengetahuan yang semula dilihat secara terkotak-kotak, kini harus dilihat secara terpadu yang menuntut pelibatan berbagai disiplin.

Demikianlah secara umum, perkembangan studi sosial sebagai suatu bidang kajian telah dibahas. Perkembangan tersebut melukiskan bagaimana studi sosial pada dunia persekolahan telah menjadi dasar ontologi dari suatu sistem pengetahuan yang terpadu, yang secara epistemologi telah mengarungi suatu perjalanan pemikiran dalam kurun waktu 60 tahun lebih yang dimotori dan diwadahi oleh NCSS sejak tahun 1935. pemikiran secara tersurat dan tersirat merentang dalam suatu kontinum gagasan studi sosial Edgar Bruce Wesley (1935) sampai ke gagasan studi sosial terbaru dari NCSS (1994).

Pemikiran mengenai studi sosial sebagaimana telah dibahas dalam bab ini, tercatat banyak mempengaruhi pemikiran dalam bidang itu di negara lain, termasuk pemikiran dalam bidang itu di negara lain, termasuk pemikiran mengenai Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) di Indonesia.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Bagaimana menurut pendapat Anda tentang hubungan pengertian dan sisi dari *social studies* menurut Barr, Barth, dan Shermis, jelaskan dengan singkat!
- 2) Coba Anda jelaskan mengapa terjadi tarik-menarik antara dua visi dari *social studies* yang ditegaskan oleh Barr dan kawan-kawan!
- 3) Ada tiga tradisi visi, misi, dan strategi *social studies* yang dikemukakan oleh Barr dan kawan-kawan. Coba Anda jelaskan!
- 4) Ada 4 hal yang tersirat dan tersurat dalam definisi *social studies* menurut Barr, coba Anda jelaskan!
- 5) dalam wacana kurikulum sistem pendidikan di Indonesia ada 3 jenis program pendidikan sosial, coba Anda jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pengertian *social studies* adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan, sedangkan isi *social studies* adalah aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat yang dalam praktik dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi.
- 2) Terjadinya tarik menarik antara dua visi *social studies* karena di satu pihak adanya gerakan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial untuk tujuan “citizenship education” yang terus bergulir sampai mencapai tahap yang lebih canggih. Sedangkan di lain pihak terus bergulirnya gerakan pemisahan berbagai disiplin ilmu sosial yang cenderung memperlemah konsepsi *social studies education*.
- 3) Tiga tradisi visi, misi, dan strategi *social studies* menurut Barr dan kawan-kawan adalah:
 - a. *social studies taught as citizenship transmission;*
 - b. *social studies taught as social science;*
 - c. *social studies taught as reflective inquiry.*
- 4) Empat hal yang tersirat dan tersurat dalam definisi menurut Barr adalah:
 - a. “social studies” merupakan suatu sistem pengetahuan terpadu;
 - b. misi utama “social studies” sebagai pendidikan kewarganegaraan dalam suatu masyarakat yang demokratis;
 - c. sumber utama/*contents* “social studies” adalah “social sciences” dan humanities;
 - d. dalam upaya penyiapan warga negara yang demokratis terbuka kemungkinan perbedaan dalam orientasi, misi, tujuan, dan metode pembelajaran.
- 5) Tiga jenis program pendidikan sosial adalah:
 - a. program pendidikan ilmu-ilmu sosial (IIS) yang dibina pada fakultas-fakultas sosial;
 - b. pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial (PDIPS) yang dibina pada fakultas-fakultas pendidikan ilmu pengetahuan sosial;
 - c. pendidikan ilmu pengetahuan sosial (PIPS) yang diberikan terutama di dalam pendidikan persekolahan



Rangkuman

1. Dalam wacana kurikulum sistem Pendidikan di Indonesia terdapat tiga jenis program pendidikan sosial, yakni: program (pendidikan) ilmu-ilmu sosial (IIS) yang dibina pada fakultas-fakultas sosial murni; pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial (PDIPS) yang dibina pada fakultas-fakultas pendidikan ilmu sosial; dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial (PIPS) yang diberikan terutama di dalam pendidikan persekolahan.

2. Perkembangan PIPS dan PDIPS secara konseptual terkait erat pada konsep studi sosial secara umum, dan secara kurikuler terkait erat pada perkembangan PIPS dalam dunia persekolahan. Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana karakteristik dan perkembangan PDIPS perlu dikaitkan dengan konsep, dan perkembangan “social studies” dan konsep serta perkembangan PIPS dalam dunia persekolahan.
3. Konsep studi sosial secara umum, berkembang secara evolusioner di Amerika Serikat sejak tahun 1800-an, yang kemudian mengkrystal menjadi domain pengkajian akademik pada tahun 1900-an, antara lain dengan berdirinya *National Council for the Social Studies* (NCSS) pada tahun 1935. Pilar akademik pertama muncul dalam pertemuan pertama NCSS tahun 1935, berupa kesepakatan untuk menempatkan studi sosial sebagai inti kurikulum, dan pada tahun 1937 berupa kesepakatan mengenai pengertian studi sosial yang berawal dari pandangan Edgar Bruce Wesley, yakni studi sosial adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk kepentingan pembelajaran.
4. Dari penelusuran historis epistemologis, tercatat bahwa dalam kurun waktu 40 tahunan sejak tahun 1935 bidang studi sosial mengalami perkembangan yang ditandai dengan ketidakmenentuan, ketidak-berkeputusan, ketidakbersatuan, dan ketidakkmajuan. Antara tahun 1940-1950 studi sosial mendapat serangan dari berbagai sudut; tahun 1960-1970-an timbulnya tarik-menarik antara pendukung gerakan *the new social studies* yang dimotori oleh para sejarawan dan ahli-ahli ilmu sosial dengan gerakan studi sosial yang menekankan pada pendidikan kewarganegaraan. Para pendukung gerakan *the new social studies* kemudian mendirikan Konsorsium Pendidikan Ilmu Sosial (SSEC). Sedangkan NCSS terus mengembangkan gerakan studi sosial yang terpisah pada pendidikan kewarganegaraan.
5. Pada era 1980-1990-an NCSS kelompok berhasil, menyepakati ruang lingkup dan urutan studi sosial, yakni tahun 1963; kemudian pada tahun 1989 berhasil disepakati konsep studi sosial untuk abad ke 21 yang dituangkan dalam *Charting A Course: Social Studies for the 21st Century*, dan terakhir pada tahun 1994 disepakati *Curriculum Standards for Social Studies*. Dalam perkembangan terakhir itu NCSS masih tetap menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai inti dari tujuan studi sosial. Sementara itu, pada kelompok SSEC, kelompok bidang studi ekonomi mengembangkan secara tersendiri pendidikan ekonomi.



Tes Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut ini adalah jenis-jenis program pendidikan sosial dalam wacana kurikulum sistem pendidikan di Indonesia, *kecuali*
 - A. program pendidikan ilmu-ilmu sosial
 - B. pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial
 - C. pendidikan ilmu pengetahuan sosial
 - D. pengetahuan pendidikan sosial

- 2) Pendidikan Disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial (PDIPS) dibina pada
 - A. fakultas pendidikan ilmu pengetahuan sosial
 - B. fakultas sosial murni
 - C. pendidikan persekolahan
 - D. lembaga sosial

- 3) Perkembangan PIPS dan PDIPS secara konseptual terkait erat pada konsep
 - A. *social studies*
 - B. *social education*
 - C. *study social*
 - D. *social science*

- 4) Pada tahun 1800-an di Amerika Serikat konsep studi sosial secara umum berkembang secara evolusioner, yang kemudian pada tahun 1900-an mengkristal menjadi domain pengkajian
 - A. akademik
 - B. administratif
 - C. inovatif
 - D. evaluatif

- 5) Pengertian studi sosial adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk kepentingan pembelajaran dari Edgar Bruce Wesley adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan
 - A. pendidikan
 - B. pengetahuan
 - C. pengajaran
 - D. ilmu

- 6) Berikut ini adalah tradisi, visi, misi, dan strategi studi sosial menurut Barr dan kawan-kawan, *kecuali* studi sosial diajarkan sebagai
 - A. *citizenship transmission*
 - B. *social science*
 - C. *reflective inquiry*
 - D. *social criticism*

- 7) Studi sosial merupakan disiplin turunan dari ilmu-ilmu sosial atau sebagai *an offspring of the social sciences*, penjelasan ini dikemukakan
 - A. Welton dan Mallan
 - B. Barr dan kawan-kawan
 - C. Edgar Bruce Wesley
 - D. Wilbur Mura

- 8) Program *social studies* dalam dunia pendidikan persekolahan mulai dari TK sampai dengan pendidikan menengah ditandai oleh keterpaduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam dan antar
- disiplin
 - ilmu
 - pendidikan
 - pedagogis
- 9) Murid Anda di SLTP yang bernama Rudi pada pelajaran Sejarah mendapat nilai 7, Geografi mendapat nilai 8, dan Ekonomi mendapat nilai 6. Ketika Anda memberi nilai pada rapor Badu dengan cara mengambil nilai rata-rata, yaitu 7, nilai rata-rata tersebut adalah nilai rata-rata
- ilmu-ilmu sosial
 - ilmu pengetahuan sosial
 - keterampilan sosial
 - pengetahuan ilmu sosial
- 10) Pada tahun 1960-1970-an timbulnya tarik-menarik antara pendukung gerakan *the new social studies* yang dimotori oleh sejarawan dan ahli ilmu-ilmu sosial dengan gerakan *social studies* yang menekankan kepada citizenship
- education*
 - science*
 - knowledge*
 - pedagogy*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

**Kegiatan
Belajar
2**

Paradigma Pendidikan IPS

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang paradigma pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) serta untuk memudahkan Anda dalam memahami materi tersebut, penulis ingin mengajak Anda untuk mendapatkan penjelasan tentang (1) perkembangan masyarakat Indonesia, dan (2) orientasi studi sosial dan Pendidikan IPS. Pemahaman tentang kedua hal tersebut sangat penting bagi kita untuk memberikan dasar pemahaman tentang apa dan mengapa reorientasi pendidikan IPS di Indonesia. Pemahaman tentang perkembangan masyarakat Indonesia di masa lalu diharapkan dapat memberi landasan kontekstual tentang pendidikan IPS dalam konteks Indonesia. Pada bagian ini akan bersama-sama menyimak hal-hal yang terkait dengan interaksi perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat Indonesia dalam konteks kecenderungan kehidupan global. Di samping itu, manfaat lain yang dapat kita peroleh adalah kita akan memiliki gambaran tentang gerakan demokratisasi yang semakin mendunia.

A. PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA

Pembahasan tentang pendidikan IPS tidak bisa dilepaskan dari interaksi fungsional perkembangan masyarakat Indonesia dengan sistem dan praksis pendidikannya. Yang dimaksud dengan interaksi fungsional di sini adalah bagaimana perkembangan masyarakat mengimplikasi terhadap tubuh pengetahuan pendidikan IPS, dan sebaliknya bagaimana tubuh pengetahuan pendidikan IPS turut memfasilitasi pengembangan aktor sosial dan warga negara yang cerdas dan baik, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi yang bermakna terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Dalam mengkaji perubahan dalam masyarakat, perlu diawali dengan postulat yang telah diterima secara umum, bahwa dalam kehidupan ini perubahan merupakan suatu keniscayaan karena tidak ada yang tetap kecuali perubahan. Perubahan merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia dan niscaya terjadi secara terus-menerus. Proses perubahan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah berbagai aspek perubahan yang berkaitan erat langsung atau tak langsung dengan pemikiran, sikap, dan tindakan manusia dalam lingkup global yang memberi konteks terhadap pemikiran, sikap, dan tindakan manusia Indonesia.

Sebagaimana dapat disimak dari berbagai sumber kepustakaan dan informasi aktual, dewasa ini masyarakat dunia ditengarai oleh berbagai gejala yang menunjukkan

sedang terjadinya krisis yang menyeluruh. Keseluruhan krisis itu, seperti dicontohkan oleh Capra (1998:11) berupa: "...angka inflasi yang tinggi dan pengangguran, krisis energi, krisis penanganan kesehatan, polusi dan kerusakan lingkungan, maraknya kejahatan dan kriminalitas", diteorikan sebagai sisi-sisi dari suatu krisis yang sama, yakni "krisis persepsi". Hal ini terjadi, demikian ditegaskannya sebagai akibat dari penerapan konsep-konsep dari "...pandangan dunia yang sudah usang-pandangan dunia mekanistik sains Cartesian dan Newtonian kepada realitas yang memang sudah tidak dapat lagi dipahami dalam konsep-konsep ini". Dikatakan lebih lanjut bahwa "Sekarang kita hidup dalam dunia yang saling berhubungan secara global, di mana fenomena-fenomena biologis, fisik, sosial maupun lingkungan saling ketergantungan. Untuk menjelaskan dunia ini secara memadai kita memerlukan sebuah perspektif ekologis, yang tidak ditemukan dalam pandangan dunia Cartesian". Oleh karena itu, menurut Capra (1998:1) diperlukan adanya "...paradigma baru visi baru tentang realitas; perubahan yang mendasar pada pemikiran, persepsi, dan nilai yang kita miliki [yakni]... pergeseran dari konsepsi mekanistik kepada konsepsi realitas yang holistik".

Untuk memahami semua gejala krisis dalam konteks kehidupan global yang sistemik, diperlukan cara pandang yang utuh dan menyeluruh yang oleh Capra (1998:11) disebut sebagai cara memandang situasi "...dalam konteks evolusi budaya manusia". Dengan merujuk pada teori perubahan "tantangan dan tanggapan" (*challenge and response*) dari Toynbee, yang pada dasarnya meneorikan "Tantangan dari lingkungan alam dan sosial memancing tanggapan kreatif dari suatu masyarakat, atau kelompok sosial, yang mendorong masyarakat itu untuk memasuki proses peradaban, Capra (1998:13-17) mengemukakan adanya "Irama berulang dalam pertumbuhan budaya", yang pada dasarnya merupakan siklus interaktif antara dua kekuatan yang saling mempengaruhi yang ia ambil dari filsafat Cina, yakni "yin" sebagai lambang dari "kepasifan" dan "yang" sebagai lambang dari "keaktifan". Dua kekuatan ini, demikian lebih lanjut ditegaskan oleh Capra (1998:2936) dapat ditafsirkan sebagai kekuatan "yin" yang bersifat "responsif, konsolidatif, dan kooperatif" atau disebut juga sebagai "ego-action" yang berkarakter "intuitif, dan kekuatan "yang" yang bersifat agresif, *ekspansif*, dan, *kompetitif* atau disebut juga sebagai *ego-action* yang berkarakter "rasional". Pemikiran yang responsif, konsolidatif, kooperatif, dan berkarakter intuitif ini cenderung bersifat padu, holistik, dan non linear. Sedangkan pemikiran yang agresif, ekspansif, kompetitif, dan berkarakter rasional cenderung bersifat linear, terfokus, dan analitis, serta terpotong-potong. Atau dengan kata lain Capra (1998:29) menyimpulkan bahwa "pengetahuan rasional" yang dilambangkan dengan kekuatan "yang" itu melahirkan aktivitas yang terpusat pada diri, sedang "kearifan intuitif" yang dilambangkan dengan kekuatan "yin" melahirkan aktivitas ekologis atau sadar lingkungan.

Merujuk pada pandangan Capra (1999) tersebut di atas, dapatlah ditafsirkan bahwa tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan paradigma berpikir ilmiah sehingga kita tidak lagi agresif, ekspansif, dan kompetitif. Akan tetapi, kita juga perlu secara proporsional menggunakan paradigma berwawasan intuitif yang bersifat sintesis, sadar lingkungan, dan holistik sehingga ada interaksi yang harmonis antara kekuatan

rasionalitas dan intuitif. Dengan cara itu, memungkinkan kita dapat memilih dengan tepat, untuk hal apa dan kapan seharusnya menggunakan paradigma berpikir rasional, dan untuk hal apa dan kapan seharusnya menggunakan paradigma kearifan intuisi. Yang patut dicatat adalah bahwa dalam kehidupan ini selalu terdapat saling ketergantungan, di mana satu persoalan yang timbul tidaklah mungkin berdiri sendiri. Karena itu, cara pandang yang bersifat holistik seyogianya menjadi pola dasar dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Demikian juga dalam menyimak dan menyikapi berbagai kecenderungan dalam masyarakat Indonesia dalam konteks kecenderungan masyarakat global.

Dalam memasuki abad ke-21 awal milenium ketiga, Indonesia yang dulu oleh pemerintah Orde Baru dicanangkan sudah bisa tinggal landas, secara mengejutkan justru mengalami krisis dalam hampir seluruh aspek kehidupannya. Dimulai dengan krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, ternyata berlanjut ke krisis kepercayaan, krisis ekonomi, krisis politik yang berujung dengan berhentinya Presiden Soeharto dan tampilnya Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden RI ke tiga dengan Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai kelengkapan pemerintahannya. Di dalam era kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, walaupun berbagai upaya telah mulai dicoba untuk mengatasi berbagai krisis tersebut, ternyata belum dapat menyentuh semua dimensi krisis tersebut, malahan kemudian berkembang menjadi krisis sosial-budaya, termasuk di dalamnya krisis pendidikan.

Sampai saat ini, tanda-tanda yang signifikan menuju penyelesaian secara menyeluruh dan tuntas belum cukup menjanjikan karena memang memerlukan waktu. Harapan yang besar seluruh rakyat Indonesia kemudian digantungkan pada pemerintahan Indonesia yang baru di bawah kepemimpinan nasional Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang benar-benar memperoleh legitimasi MPR hasil Pemilihan Umum 7 Juni 1999 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan dilanjutkan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Kini, di bawah kepemimpinan presiden yang baru Susilo Bambang Yudoyono, bangsa Indonesia menanamkan harapan besar. Namun demikian, situasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia sampai saat ini masih tetap diliputi ketidakpastian dengan krisis multidimensional yang terus berkepanjangan. Kehidupan politik dengan sistem multipartai tampak penuh dengan euforia demokrasi yang salah kaprah ternyata berujung pada ketidakserasian hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Keadaan itu semua ternyata telah memperparah kehidupan ekonomi yang juga secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan dampak sosial-kultural yang juga penuh dengan ketidakpastian.

Dalam situasi seperti itu, berbagai pertanyaan muncul mengenai prospek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia pada abad ke-21 mendatang dalam konteks berbagai kecenderungan global yang ada sebagaimana dapat disimak dari prediksi dan pengamatan para ahli. Berkaitan dengan prospek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, “Megatrends Asia” sebagaimana diramalkan oleh Naisbitt (1996:xviii-xx) perlu dilihat sebagai latar konteks regional, yang apabila hal itu benar terjadi, akan mewarnai kehidupan masyarakat-bangsa dan negara Indonesia

di masa mendatang. Kedelapan kecenderungan Asia yang diramalkan akan mengubah dunia itu adalah perubahan-perubahan dari: “Negara Bangsa ke Jaringan; Tuntutan Ekspor ke Tuntutan Konsumen; Pengaruh Barat ke Cara Asia; Kontrol Pemerintah ke Tuntutan Pasar; Desa ke Metropolitan; Padat Karya ke Teknologi Canggih; Dominasi Kaum Pria ke Munculnya Kaum Wanita; dan Barat ke Timur”.

Bila ke delapan kecenderungan itu dianalisis dengan cermat, secara konseptual menyiratkan bahwa pada masa yang akan datang ada kecenderungan bertambah luasnya jaringan kerja sama antarnegara yang berarti meningkatnya pengertian dan mungkin juga konflik kepentingan antarnegara; peningkatan kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi tuntutan konsumen, yang berarti meningkatnya tuntutan perbaikan kualitas pelayanan ekonomi; bangkitnya orang-orang Asia, yang berarti meningkatnya tuntutan pengembangan kepercayaan diri atas dasar kemampuan, terjadinya perluasan desentralisasi, yang berarti bertambah luasnya tuntutan partisipasi warga negara dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan; meningkatnya urbanisasi, yang berarti berkembangnya tuntutan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan perluasan lapangan kerja di perkotaan; semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi yang semakin canggih, yang berarti meningkatnya tuntutan perbaikan kualitas pendidikan dalam berbagai bidang; bertambah luasnya partisipasi wanita dalam berbagai kegiatan, yang berarti meningkatnya tuntutan pendidikan bagi wanita; dan meluasnya pengaruh pemikiran dan cara kerja Asia di dunia, yang berarti akan semakin terbukanya komunikasi dan kerja sama antarindividu dan organisasi di negara-negara Asia dengan yang berada di negara-negara yang ada di belahan bumi lain.

Bila dilihat secara instrumental, sesungguhnya dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (SPN) No.2/1989 kualitas warga negara Indonesia yang diharapkan dapat dikembangkan itu telah digariskan dengan tegas. Dalam Pasal 4 tentang Tujuan Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan “...mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Kemudian dalam pasal 13 ayat (1) mengenai fungsi Pendidikan Dasar juga digariskan dengan tegas bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk “... mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan seterusnya...”. Demikian juga dalam Pasal 15 ayat (1) tentang fungsi Pendidikan Menengah dinyatakan bahwa pendidikan menengah diselenggarakan selain sebagai kelanjutan pendidikan dasar juga berfungsi untuk “... menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi”. Selanjutnya, dalam pasal 16 ayat (1) mengenai fungsi pendidikan tinggi juga ditetapkan bahwa pendidikan tinggi selain sebagai kelanjutan pendidikan menengah juga berfungsi “...menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian”. Malah di dalam Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara mengenai Agama dan Sosial Budaya dikemukakan tentang perlu ditingkatkannya “... kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, serta moral dan etika luhur masyarakat”.

Yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, dan merupakan masalah yang cukup pelik dan multidimensional atau bersegi jamak, adalah bagaimana mewujudkan nilai-nilai instrumental tersebut dalam praksis kehidupan sosial budaya dan pendidikan.

Secara khusus, Soedijarto (1999:12) mempertanyakan mengapa sistem pendidikan yang secara filosofis telah sejalan dengan cita-cita pembangunan bangsa, tetapi dalam kenyataannya belum berhasil melahirkan kinerja sosial yang secara efektif dapat mengatasi berbagai krisis. Jawaban yang diajukan Soedijarto (1999:13-22) adalah bahwa pendidikan yang belum menjadi proses peradaban, tetapi baru berperan sebagai penyajian pengetahuan; yang belum berperan efektif dalam proses sosialisasi dan pembudayaan dalam rangka proses peradaban; kondisi infrastruktur pendidikan yang belum mendukung proses sosialisasi dan pembudayaan; dan proses pembelajaran yang belum penuh tantangan dan belum didukung oleh “...tersedianya tenaga kependidikan yang berjiwa pendidik dan profesional, dengan dukungan sistem evaluasi yang relevan bagi tumbuh dan berkembangnya kemampuan, nilai, sikap, watak, dan perilaku dari manusia Indonesia yang dicita-citakan”.

Apa yang dikemukakan oleh Soedijarto (1999) tersebut memberi gambaran bagaimana tingkat kerumitan perwujudan nilai-nilai instrumental yang mengusung nilai-nilai ideal itu di dalam kenyataannya sebagai nilai praksis. Nilai-nilai yang begitu baik yang diuraikan dalam semua ketentuan perundangan, khususnya perundangan pendidikan pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai ideal yang terdapat dalam Pembukaan UUD 45, yakni “...mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kelihatannya antara nilai ideal dan nilai instrumental sudah cukup koheren. Mengapa justru ketika sampai kepada tataran praksis semua nilai yang baik itu tidak bisa terwujud sepenuhnya?

Pada tataran ideal, nilai tersebut, dalam hal ini “mencerdaskan kehidupan bangsa” dengan muatannya nilai-nilai Pancasila, sangat abstrak dan universal karena itu lebih konstan. Pada tataran instrumental, penjabaran nilai ideal tersebut relatif lebih mudah dikendalikan karena bersifat normatif dan dikerjakan di atas meja para pembuat perundangan atau lembaga birokratis. Sedangkan nilai praksis bersifat sangat kompleks karena “Nilai praksis merupakan interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu. Sifatnya amat dinamis “...dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dengan realitas, yang tidak sepenuhnya dapat kita kuasai” (Moerdiono, 1995:9). Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa nilai-nilai instrumental tentang kualitas warga negara Indonesia yang baik yang tertuang dalam perundangan pendidikan dan perundangan lainnya belum bisa diwujudkan secara optimal. Salah satu faktor yang

sangat berpengaruh terhadap perwujudan nilai praksis ini adalah kondisi objektif manusia dan lingkungannya, seperti dalam kasus pelaksanaan pendidikan nasional pada tingkat mikro adalah kondisi objektif dari guru, siswa, para administrator persekolahan, sarana dan prasarana belajar, serta interaksi antar semua itu, yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan.

Jika dilihat secara analitik, praksis pendidikan IPS dalam kehidupan masyarakat bangsa negara Indonesia, menunjukkan suatu bidang permasalahan yang bersifat utuh, menyeluruh, dan multidimensional. Di situ ada kontribusi pengalaman sejarah; kondisi objektif alam, sosial, ekonomi, politik, budaya; dan pengaruh dunia luar sebagai dampak dari kehidupan yang semakin mendunia. Oleh karena itu, pendekatan yang perlu digunakan dalam pengkajian pendidikan IPS Indonesia adalah pendekatan holistik, yang menurut Capra (1998) seperti dibahas pada awal bagian ini disebut sebagai pendekatan yang menuntut kearifan intuisi dan bersifat ekologis. Tentu saja kaidah-kaidah keilmuan pada tataran epistemologi harus tetap menjadi rujukan konseptual. Dengan demikian, kajian pendidikan IPS tidak bisa tidak harus merupakan suatu kerangka konseptual sistemik atau *integrated system of knowledge*, seperti digagaskan oleh Hartoonian (1992) atau *synthetic discipline* menurut Somantri (1998), atau *multidimensional* menurut Cogan (1998).

B. DINAMIKA GERAKAN DEMOKRATISASI

Hal lain yang mewarnai perkembangan masyarakat dunia saat ini adalah berkembangnya gerakan demokratisasi. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995:6) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 (sebelas) pilar atau soko guru, yakni “Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah, Kekuasaan Mayoritas, Hak-hak Minoritas, Jaminan Hak-hak Asasi Manusia, Pemilihan yang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan Hukum, Proses Hukum yang Wajar, Pembatasan. Pemerintahan secara Konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat”. Di lain pihak, Sanusi (1998:4-12) mengidentifikasi adanya 10 (sepuluh) pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni: “Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan *Rule of Law*, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial” (*cetak tebal* dari penulis). Bila dibandingkan, sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara 11 pilar demokrasi universal ala USIS (1995) dengan 9 dari 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi (1998). Yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan inilah yang merupakan khasnya demokrasi Indonesia, yang dalam pandangan Maududi dan kaum muslim (Elpoisito dan Voh,1999:28) disebut *teodemokrasi*, yakni demokrasi dalam

konteks kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Huntington (1991) dalam bukunya *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* yang diterjemahkan oleh Marjohan (1995) menjadi *Gelombang Demokrasi Ketiga*, membahas bagaimana dinamika pemikiran dan praksis demokrasi sepanjang sejarah. Dalam mengonseptualisasikan demokrasi Huntington (1991) mengacu pada tradisi pemikiran demokrasi dari Schumpeter (1942) yang mengajukan “metode demokratis” dalam arti “...prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat”. Bertolak dari tradisi tersebut Huntington (1991:5) memberikan batasan sistem politik abad ke-20 dinilai demokratis apabila “...para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk leluasa berhak memberikan suara”. Dari definisi itu tampak bahwa Huntington (1991) menempatkan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat yang akan berperan sebagai kelompok pengambil keputusan tertinggi sebagai “esensi demokrasi”. Namun demikian, hal itu bukanlah segalanya karena setelah pemilihan umum terbentang tuntutan lainnya, yakni “pengakhiran rezim nondemokratis, penguatan rezim demokratis, dan kemudian pengonsolidasian sistem yang demokratis” (Huntington, 1991:8). Karena itu, pemilihan umum berkala yang jujur dan adil dianggap sebagai syarat minimal dari suatu proses demokrasi. Diingatkannya (Huntington, 1991:8-12) pula bahwa walaupun pemilihan yang jujur dan adil sudah terlaksana perlu diantisipasi berbagai hal, misalnya pemimpin yang terpilih itu tidak sungguh-sungguh menjalankan kekuasaannya dengan baik; adanya kelemahan dari sistem politik yang demokratis; penyikapan terhadap demokrasi dan nondemokrasi sebagai dua hal yang dikotomis atau dua titik dalam satu kontinum; munculnya sikap dari rezim nondemokratis yang tidak mau kompetisi dalam pemilihan umum.

Dari kajian Huntington (1991:12-28) ditemukan bahwa sesungguhnya sistem politik yang demokratis itu telah berkembang secara bergelombang sepanjang sejarah dan bukan hanya ada dalam zaman modern saja. Adapun yang dimaksud dengan demokrasi modern (Huntington, 1991:13-16), ditegaskan “...bukanlah sekadar demokrasi desa, suku bangsa, atau negara kota; demokrasi modern adalah demokrasi negara-kebangsaan dan kemunculannya berkaitan dengan perkembangan negara kebangsaan”.

Secara evolusioner proses demokratisasi di masa modern dikategorikan ke dalam tiga gelombang, yakni “gelombang panjang demokratisasi pertama (1828-1926), yang berakar pada revolusi Prancis; gelombang balik pertama (1922-1942), yang ditandai adanya kecenderungan demokrasi yang mengecil dan munculnya rezim otoriter menjelang Perang Dunia II; gelombang pendek demokratisasi kedua (1943-1962), yang ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga demokrasi di wilayah pendudukan sekutu pada masa Perang Dunia II; gelombang balik kedua (1958-1975), kembali ke

otoriterisme, antara lain di Amerika Latin; dan gelombang demokratisasi ketiga (1974), yang ditandai dengan munculnya rezim-rezim demokratis menggantikan rezim totaliter di sekitar 30 negara dalam kurun waktu 15-an tahun.

Dalam konteks teori Huntington itu (1991:26-27), pada saat ini dunia, termasuk Indonesia sedang berada dalam gelombang demokratisasi ketiga yang dinilainya sangat spektakuler karena melanda seluruh penjuru dunia. Isu demokratisasi yang menonjol pada gelombang ketiga ini, antara lain: hubungan timbal balik perkembangan ekonomi dengan proses demokratisasi dan bentuk pemerintahan yang demokratis khususnya yang berkaitan dengan kebebasan individu, stabilitas politik, dan implikasinya terhadap hubungan internasional. Selain itu, dapat ditambahkan karena proses demokratisasi ini menyangkut partisipasi warga negara dalam proses politik maka penyiapan warga negara agar mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab juga merupakan isu penting dalam proses demokratisasi saat ini. Sebagaimana diyakini bahwa etos demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami. Oleh karena itu, pendidikan IPS seyogianya menjadi wahana pendidikan demokrasi dalam arti yang luas karena secara langsung menyentuh sasaran potensial kewarganegaraan yang demokratis untuk berbagai usia.

Sementara itu, pengembangan masyarakat madani Indonesia sangat erat kaitannya dengan proses demokratisasi, khususnya dalam rangka perluasan fungsi dan optimalisasi peran aktif dan warga negara yang harus dilakukan dengan cerdas dan baik dalam membangun masyarakat yang benar-benar demokratis sesuai dengan konteks negaranya maka tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya pendidikan demokrasi bagi warga negara, yang memungkinkan setiap warga negara dapat belajar demokrasi melalui praktik kehidupan yang demokratis, dan untuk membangun tatanan dan praksis kehidupan demokrasi yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, kualitas berkehidupan demokrasi dalam masyarakat madani Indonesia semakin lama semakin meningkat.

Implikasi dari pandangan tersebut maka diperlukan pendidikan yang baik yang memungkinkan warga negara, mengerti, menghargai kesempatan, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang demokratis. Menurut Gandal dan Finn (1992:3) pendidikan tersebut bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, tetapi juga menghasilkan warga negara yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin tahu, dan berpandangan jauh ke depan. Namun demikian, diingatkannya bahwa pendidikan demokrasi ini jangan hanya dilihat sebagai subjek yang terisolir yang diajarkan dalam waktu terjadwal yang cenderung diabaikan lagi, tetapi harus dikaitkan dengan banyak hal yang dipelajari siswa, mungkin dalam pelajaran sejarah, kewarganegaraan, etika, atau ekonomi, dan lebih banyak terjadi di luar sekolah. Dengan kata lain, pendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum.

Berkenaan dengan hal tersebut, disarankan (Gandal dan Finn,1992:4-5) perlu dikembangkannya model pendidikan demokrasi berbasis sekolah (*school-based democracy education*) paling tidak dalam empat alternatif bentuk. *Pertama*, perhatian

yang cermat diberikan pada landasan dan bentuk-bentuk demokrasi. *Kedua*, adanya kurikulum yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi dalam berbagai kurun waktu. Dengan demikian, siswa akan mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan demokrasi dalam berbagai konteks ruang dan waktu. *Ketiga*, adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya dalam berbagai kurun waktu. *Keempat*, tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang diterapkan di negara-negara di dunia sehingga para siswa memiliki wawasan yang luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks.

C. PARADIGMA PENDIDIKAN IPS DALAM KONTEKS INDONESIA

Perkembangan studi sosial sebagai suatu bidang kajian telah dibahas pada Kegiatan Belajar 1. Perkembangan tersebut melukiskan bagaimana studi sosial pada dunia persekolahan telah menjadi dasar ontologi dari suatu sistem pengetahuan yang terpadu, yang secara epistemologis telah mengarungi suatu perjalanan pemikiran dalam kurun waktu 60 tahun lebih yang dimotori dan diwadahi oleh NCSS sejak tahun 1935. Pemikiran tersebut secara tersurat dan tersirat merentang dalam suatu kontinum gagasan “social studies” Edgar Bruce Wesley (1935) sampai ke gagasan studi sosial terbaru dari NCSS (1994). Selanjutnya, pada Kegiatan Belajar 2 ini kita akan mencurahkan perhatian untuk membahas mengenai pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia.

Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia, banyak dipengaruhi oleh pemikiran studi sosial di Amerika Serikat yang kita anggap sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu, seperti dapat disimak dari berbagai karya akademis yang antara lain dipublikasikan oleh *National Council for the Social Studies* (NCSS) sejak pertemuan organisasi tersebut untuk pertama kalinya tanggal 28-30 November 1935 sampai sekarang.

Untuk menelusuri perkembangan pemikiran atau konsep pendidikan IPS di Indonesia secara historis epistemologis terasa sangat sukar karena dua alasan. *Pertama* di Indonesia belum ada lembaga profesional bidang pendidikan IPS setua dan sekuat pengaruh NCSS atau SSEC. Lembaga serupa yang dimiliki Indonesia, yakni HISPIPSI (Himpunan Sarjana pendidikan IPS Indonesia) usianya masih sangat muda dan produktivitas akademisnya masih belum optimal karena masih terbatas pada pertemuan tahunan dan komunikasi antaranggota secara insidental. *Kedua* perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan (disiplin) IPS sampai saat ini sangat tergantung pada pemikiran individual dan atau kelompok pakar yang ditugasi secara insidental untuk mengembangkan perangkat kurikulum IPS melalui Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbang Dikbud (Puskur).

Pengaruh akademis dari komunitas ilmiah bidang ini terhadap pengembangan IPS tersebut sangatlah terbatas, sebatas yang tersalur melalui anggotanya yang kebetulan dilibatkan dalam berbagai kegiatan tersebut. Jadi, sangat jauh berbeda dengan peranan dan kontribusi *Social Studies Curriculum Task Force*-nya NCSS, atau SSEC di Amerika Serikat.

Oleh karena itu, perkembangan pemikiran mengenai pendidikan IPS di Indonesia akan ditelusuri dari alur perubahan kurikulum IPS dalam dunia persekolahan, dikaitkan dengan beberapa *contents* pertemuan ilmiah dan penelitian yang relevan dalam bidang itu, yang secara sporadis dapat dijangkau oleh penulis.

Istilah IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), sejauh yang dapat penulis telusuri, untuk pertama kalinya muncul dalam Seminar Nasional tentang *Civic Education* tahun 1972 di Tawangmangu Solo. Menurut Laporan Seminar tersebut, (Panitia Seminar Nasional Civic Education, 1972:2, dalam Winataputra, 1978:42) ada tiga istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar-pakai (*interchangeable*), yakni “pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial” yang diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat dipahami siswa. Dengan demikian, para siswa akan dapat menghadapi dan memecahkan masalah sosial sehari-hari. Pada saat itu, konsep IPS tersebut belum masuk ke dalam kurikulum sekolah, tetapi baru dalam wacana akademis yang muncul dalam seminar tersebut. Kemunculan istilah tersebut bersamaan dengan munculnya istilah IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dalam wacana akademis pendidikan Sains. Pengertian IPS yang disepakati dalam Seminar tersebut dapat dianggap sebagai pilar pertama dalam perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS. Berbeda dengan pemunculan pengertian studi sosial dari Edgar Bruce Wesley dalam pertemuan pertama NCSS tahun 1937 yang segera dapat respons akademis secara meluas dan melahirkan kontroversi akademik, pemunculan pengertian IPS dengan mudah diterima dengan sedikit komentar.

Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972-1973, yakni dalam Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Hal ini terjadi karena barangkali kebetulan beberapa pakar yang menjadi pemikir dalam Seminar *Civic Education* di Tawangmangu itu, seperti Achmad Sanusi, Numan Somantri, Achmad Kosasih Djahiri, dan Dedih Suwardi berasal dari IKIP Bandung, dan pada pengembangan Kurikulum PPSP FKIP Bandung berperan sebagai anggota tim pengembang kurikulum tersebut. Dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah “Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial” sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Penggunaan garis miring nampaknya mengisyaratkan adanya pengaruh dari konsep pengajaran sosial yang walaupun tidak diberi label IPS, telah diadopsi dalam kurikulum SD tahun 1968. Dalam Kurikulum tersebut, digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang di dalamnya tercakup Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, dan Civics yang diartikan sebagai Pengetahuan Kewargaan Negara. Oleh karena itu, dalam kurikulum SD PPSP tersebut konsep IPS diartikan sama dengan Pendidikan Kewargaan Negara. Penggunaan istilah studi sosial nampaknya dipengaruhi

oleh pemikiran atau penafsiran Achmad Sanusi yang pada tahun 1972 menerbitkan sebuah manuskrip berjudul “Studi Sosial: Pengantar Menuju Sekolah Komprehensif” yang isinya diwarnai oleh pemikiran Leonard Kenworthy (1970) dengan bukunya “Teaching Social Studies”.

Sedangkan dalam Kurikulum Sekolah Menengah 4 tahun, digunakan tiga istilah yakni (1) Studi Sosial sebagai mata pelajaran inti untuk semua siswa dan sebagai bendera untuk kelompok mata pelajaran sosial yang terdiri atas geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai mata pelajaran major pada jurusan IPS; (2) Pendidikan Kewargaan Negara sebagai mata pelajaran inti bagi semua jurusan; dan (3) Civics dan Hukum sebagai mata pelajaran major pada jurusan IPS (PPSP IKIP Bandung, 1973a, 1973b).

Kurikulum PPSP tersebut dapat dianggap sebagai pilar kedua dalam perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS, yakni masuknya kesepakatan akademis tentang IPS ke dalam kurikulum sekolah. Pada tahap ini, konsep pendidikan IPS diwujudkan dalam tiga bentuk, yakni (1) pendidikan IPS terintegrasi dengan nama Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial, (2) pendidikan IPS terpisah, di mana istilah IPS hanya digunakan sebagai konsep payung untuk mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi; dan (3) pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus, yang dalam konsep tradisi “*social studies*” termasuk tradisi *citizenship transmission* (Barr, dan kawan-kawan: 1978).

Konsep pendidikan IPS tersebut kemudian memberi inspirasi terhadap Kurikulum 1975, yang memang dalam banyak hal mengadopsi inovasi yang dicoba melalui Kurikulum PPSP. Di dalam Kurikulum 1975 pendidikan IPS menampilkan empat profil, yakni: (1) Pendidikan Moral Pancasila menggantikan Pendidikan Kewargaan Negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi *citizenship transmission*; (2) pendidikan IPS terpadu untuk Sekolah Dasar; (3) pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi; dan (4) pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA, atau sejarah dan geografi untuk SPG (Dep. P dan K, 1975a; 1975b, 1975c; dan 1976). Konsep pendidikan IPS seperti itu, tetap dipertahankan dalam Kurikulum 1984, yang memang secara konseptual merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975. Penyempurnaan yang dilakukan khususnya dalam aktualisasi materi yang disesuaikan dengan perkembangan baru dalam masing-masing disiplin, seperti masuknya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai materi pokok Pendidikan Moral Pancasila. Sedang konsep pendidikan IPS itu sendiri tidak mengalami perubahan yang mendasar.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam wacana pendidikan IPS muncul dua bahan kajian kurikuler pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ketika ditetapkan kurikulum 1994 menggantikan kurikulum 1984, kedua bahan kajian tersebut dilembagakan menjadi satu pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Secara konseptual mata pelajaran ini masih tetap merupakan bidang pendidikan IPS yang

khusus mewadahi tradisi *citizenship transmission* dengan muatan utama butir-butir nilai Pancasila yang diorganisasikan dengan menggunakan pendekatan *spiral of concept development* ala Taba (Taba: 1967) dan *expanding environment approach* ala Hanna (Dufty: 1970) dengan bertitik tolak dari masing-masing sila Pancasila.

Di dalam Kurikulum 1994 mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran sosial khusus yang wajib diikuti oleh semua siswa setiap jenjang pendidikan (SD, SLTP, SMU). Sedangkan, mata pelajaran IPS diwujudkan dalam: *pertama*, pendidikan IPS terpadu di SD kelas III s/d kelas VI; *kedua*, pendidikan IPS terkonfederasi di SLTP yang mencakup materi geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi, dan *ketiga*, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mirip dengan tradisi *in social studies taught as social science* menurut Barr dan kawan-kawan (1978). Di SMU ini, bidang pendidikan IPS terpisah-pisah terdiri atas mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum di kelas I dan II; Ekonomi dan Geografi di kelas I dan II; Sosiologi di kelas II; Sejarah Budaya di kelas III Program Bahasa; Ekonomi, Sosiologi, Tata Negara, dan Antropologi di kelas III program IPS.

Dilihat dari tujuannya, setiap mata pelajaran sosial memiliki tujuan yang bervariasi. Mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum bertujuan untuk "...menanamkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa kini, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa bangga sebagai warga bangsa Indonesia, dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antarbangsa di dunia" (Depdikbud, 1993: 23-24). Dimensi tujuan tersebut pada dasarnya mengandung esensi pendidikan kewarganegaraan atau tradisi "*citizenship transmission*" (Barr, dan kawan-kawan: 1978). Mata pelajaran Ekonomi bertujuan untuk memberikan pengetahuan konsep-konsep dan teori sederhana dan menerapkannya dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya secara kritis dan objektif" (Depdikbud, 1993: 29). Sedang untuk Program IPS mata pelajaran Ekonomi ini bertujuan untuk "...memberikan bekal kepada siswa mengenal beberapa konsep dan teori ekonomi sederhana untuk menjelaskan fakta, peristiwa, dan masalah ekonomi yang dihadapi" (Depdikbud, 1993: 29). Dari rumusan tujuan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa tujuan pendidikan ekonomi di SMU, baik untuk program umum maupun untuk program IPS mengisyaratkan diterapkannya tradisi studi sosial yang diajarkan sebagai ilmu sosial (Barr dkk. 1978).

Tradisi ini tampaknya diterapkan juga dalam mata pelajaran Sosiologi, Geografi, Tata Negara, Sejarah Budaya, dan Antropologi sebagaimana dapat dikaji dari masing-masing tujuannya. Mata pelajaran sosiologi memiliki tujuan "...untuk memberikan kemampuan memahami secara kritis berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang muncul seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya, menanamkan kesadaran perlunya ketentuan masyarakat, dan mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi sosial budaya sesuai dengan kedudukan, peran, norma, dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat" (Depdikbud, 1993: 30). Sementara itu, mata pelajaran Geografi memusatkan perhatian pada upaya "...untuk memberikan bekal kemampuan dan sikap rasional yang bertanggung jawab dalam menghadapi gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta

permasalahannya yang timbul akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya” (Depdikbud, 1993: 30). Sedangkan mata pelajaran Tata Negara menggariskan tujuan “... untuk meningkatkan kemampuan agar siswa memahami penyelenggaraan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan, sistem pemerintahan negara RI maupun negara lain” (Depdikbud, 1993: 31).

Hal yang juga tampak sejalan terdapat dalam rumusan tujuan mata pelajaran Sejarah Budaya yang menggariskan tujuannya untuk “...menanamkan pengertian adanya keterkaitan perkembangan budaya masyarakat pada masa lampau, masa kini, dan masa mendatang sehingga siswa menyadari dan menghargai hasil dan nilai budaya pada masa lampau dan masa kini” (Depdikbud, 1993: 31). Demikian juga dalam tujuan mata pelajaran Antropologi yang dengan tegas diorientasikan pada upaya untuk “... memberikan pengetahuan mengenai proses terjadinya kebudayaan, pemanfaatan dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari; menanamkan kesadaran perlunya menghargai nilai-nilai budaya suatu bangsa, terutama bangsa sendiri”, dan pada akhirnya dimaksudkan juga untuk “...menanamkan kesadaran tentang peranan kebudayaan dalam perkembangan dan pembangunan masyarakat serta dampak perubahan kebudayaan terhadap kehidupan masyarakat” (Depdikbud, 1993: 33).

Bila disimak dari perkembangan pemikiran pendidikan IPS yang terwujud dalam kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an ini, pendidikan IPS di Indonesia mempunyai dua konsep pendidikan IPS, yakni: *pertama*, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi “citizenship transmission” dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Nasional; *kedua*, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi ilmu sosial dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMU, yang terkonfederasi di SLTP, dan yang terintegrasi di SD.

Selanjutnya, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh bagaimana perkembangan pemikiran mengenai pendidikan IPS ini, bila dilihat dari kajian konseptual para pakar Indonesia. Dalam pembahasannya tentang “Perspektif Pendidikan Ilmu (Pengetahuan) Sosial”, Achmad Sanusi (1998) dalam konteks pembahasannya yang sangat mendasar mengenai pendidikan IPS di IKIP, menyinggung sedikit tentang pengajaran IPS di sekolah. Sanusi (1998: 222-227) melihat pengajaran IPS di sekolah cenderung menitikberatkan pada penguasaan hafalan; proses pembelajaran yang terpusat pada guru; terjadinya banyak miskonsepsi; situasi kesal yang membosankan siswa; ketidaklebihhinggulan guru dari sumber lain; ketidakmutahiran sumber belajar yang ada; sistem ujian yang sentralistik; pencapaian tujuan kognitif yang “mengulit-bawang”; rendahnya rasa percaya diri siswa sebagai akibat dari amat lunaknya isi pelajaran, kontradiksi materi dengan kenyataan, dominannya latihan berpikir taraf rendah, guru yang tidak tangguh, persepsi negatif dan prasangka buruk dari masyarakat terhadap kedudukan dan peran ilmu sosial dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, Sanusi (1998) merekomendasikan perlunya reorientasi pengembangan yang mencakup peningkatan mutu SDM dalam hal ini guru agar lebih mampu mengembangkan kecerdasan siswa lebih optimal melalui variasi interaksi dan pemanfaatan media dan

sumber belajar yang lebih menantang. Bersamaan itu pula, diperlukan upaya peningkatan dukungan sarana dan prasarana serta insentif yang *fair*. Dalam dimensi konseptual, Sanusi (1998: 242-247) menyarankan perlunya batasan yang jelas mengenai tujuan dan *contents* pendidikan ilmu sosial untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk di dalamnya pola pemilihan dan pengorganisasian tema-tema pembelajaran yang dinilai lebih esensial dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan dalam masyarakat.

Dimensi konseptual mengenai pendidikan IPS tampaknya telah berulang kali dibahas dalam rangkaian pertemuan ilmiah, yakni Pertemuan HISPIPSI pertama tahun 1989 di Bandung, Forum Komunikasi Pimpinan FPIPS di Yogyakarta tahun 1991, di Padang tahun 1992, di Ujung Pandang tahun 1993, Konvensi Pendidikan kedua di Medan tahun 1992. Salah satu materi yang selalu menjadi agenda pembahasan adalah mengenai konsep PIPS. Dalam pertemuan Ujung Pandang tahun 1993, M. Numan Somantri selaku pakar dan Ketua HISPIPSI (Somantri: 1993) kembali menegaskan adanya dua versi PIPS sebagaimana dirumuskan dalam Pertemuan Yogyakarta tahun 1991, sebagai berikut.

“Versi PIPS Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah:

PIPS adalah penyederhanaan, adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia, yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan.

“Versi PIPS Untuk HIPS dan Jurusan Pendidikan IPS-IKIP:

PIPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan”

Kelihatannya HISPIPSI ingin mencoba menjernihkan pengertian PIPS dengan cara menggunakan label yang sama, yakni PIPS tetapi dengan dua versi pengertian, yakni pengertian PIPS untuk pendidikan persekolahan dan untuk pendidikan tinggi untuk guru IPS di IKIP/STKIP/FKIP. Dari dua versi pengertian itu, yang membedakannya penulis pikir, dalam format sistem pengetahuannya. Untuk dunia persekolahan merupakan penyederhanaan, atau sama dengan gagasan Wesley (1937) dengan konsep ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan, sedang untuk pendidikan guru IPS berupa seleksi. Namun, rasanya perbedaannya tidak begitu jelas, kecuali seperti dikatakan oleh Somantri (1993: 8) dalam tingkat kesukarannya sesuai dengan jenjang pendidikan itu, yakni di dunia persekolahan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, sedang di perguruan tinggi disesuaikan dengan taraf pendidikan tinggi. Penjelasan ini menurut penulis terkesan bersifat tautologis. Kedua versi pengertian PIPS tersebut masih dipertahankan sampai dalam Pertemuan Terbatas HISPIPSI di Universitas Terbuka, Jakarta tahun 1998 (Somantri, 1998: 5-6), dan disepakati akan menjadi salah satu esensi dari “*position paper*” HISPIPSI tentang disiplin PIPS yang akan diajukan kepada LIPI.

Jika dilihat dari pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh Numan Somantri selaku Ketua HISPIPSI (Somantri: 1998) *Position Paper* itu akan menyajikan penegasan mengenai kedudukan PIPS sebagai *synthetic discipline* atau menurut Hartonian (1992)

sebagai *integrated system of knowledge*. Oleh karena itu, PIPS untuk tingkat perguruan tinggi pendidikan guru IPS, direkonseptualisasikan sebagai pendidikan disiplin ilmu sehingga menjadi Pendidikan Disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial disingkat menjadi PDIPS. Dengan demikian, kelihatannya HISPIPSI akan memegang dua konsep, yakni konsep PIPS untuk dunia persekolahan, dan konsep PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS. Yang masih perlu dikembangkan adalah logika internal atau struktur dari kedua sistem pengetahuan tersebut. Dengan demikian, masing-masing memiliki jati diri konseptual yang unik dan dapat dipahami lebih jernih.

Tentang kedudukan PIPS/PDIPS dalam konteks yang lebih luas tampaknya cukup prospektif misalnya, Dahlan (1997) melihat PIPS sebagai upaya strategis pembangunan manusia seutuhnya untuk menghadapi era globalisasi. Sementara itu, Tsauri (1997: 1) yang mengutip pemikiran Affian ketika mengenang tokoh LIPI Profesor Sarwono Prawirohardjo, melihat peranan PIPS dalam perspektif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, yang seyogianya memusatkan perhatian pada upaya pengembangan disiplin yang kuat, ketekunan yang luar biasa, integritas diri yang kukuh, wibawa yang mantap, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan pengabdian yang dalam.

Dilihat dari perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia sampai saat ini pendidikan IPS terpilah dalam dua arah, yakni: *Pertama*, PIPS untuk dunia persekolahan yang pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial, dan humaniora, yang diorganisasikan secara psiko-pedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan; dan *kedua*, PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS yang pada dasarnya merupakan penyeleksian dan pengorganisasian secara ilmiah dan meta psiko-pedagogis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan disiplin lain yang relevan, untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS. PIPS merupakan salah satu *contents* dalam PDIPS.

PIPS untuk dunia persekolahan terpilah menjadi dua versi atau tradisi akademik pedagogis, yakni: *pertama*, PIPS dalam tradisi "*citizenship transmission*" dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Indonesia; dan *kedua* PIPS dalam tradisi "ilmu sosial" (*social science*) dalam bentuk mata pelajaran IPS terpadu untuk SD, dan mata pelajaran IPS terkonfederasi untuk SLTP, dan IPS terpisah-pisah untuk SMU. Kedua tradisi PIPS tersebut, terikat oleh suatu visi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana digariskan dalam GBHN dan UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perkembangan pemikiran mengenai PIPS ini amat berpengaruh pada pemikiran PDIPS di IKIP/FKIP/STKIP.

Dalam konteks perkembangan pendidikan studi sosial di Amerika atau "Pendidikan IPS" di Indonesia konsep dan praksis pendidikan demokrasi yang dikemas sebagai "*citizenship education*" atau "Pendidikan Kewarganegaraan" berkedudukan sebagai salah satu dimensi dari tujuan, *contents* dan proses studi sosial atau "pendidikan IPS", atau dapat juga dikatakan bahwa pendidikan demokrasi merupakan salah satu subsistem dalam sistem pembelajaran studi sosial atau "pendidikan IPS". Walaupun demikian, subsistem pendidikan demokrasi ini sejak awal perkembangannya, seperti di Amerika sudah menunjukkan keunikan dan kemandiriannya sebagai program

pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik. Substansi ini, sejalan dengan perkembangan konsep dan praksis demokrasi, terus berkembang sebagai suatu bidang kajian dan program pendidikan yang dikenal dengan *citizenship education* atau *civic education*, atau untuk Indonesia dikenal dalam label yang berubah-ubah mulai dari *Civics*, Kewargaan Negara, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Jika dikaji dengan cermat dalam konteks perkembangan studi sosial ternyata pendidikan kewarganegaraan yang pada dasarnya berintikan pengembangan warga negara agar mampu hidup secara demokratis merupakan bagian yang sangat penting dalam studi sosial. Hal itu dapat disimak sejak studi sosial mulai diwacanakan tahun 1937 oleh Edgar Bruce Wesley, yang definisinya tentang studi sosial dianggap sebagai pilar epistemologis pertama, sampai dengan munculnya paradigma studi sosial dari NCSS tahun 1994. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa esensi pendidikan demokrasi sesungguhnya merupakan bagian integral dari studi sosial.

Bidang kajian dan program pendidikan demokrasi dalam bentuk kemasan "*Citizenship education*" maupun "*Civic Education*" atau pendidikan kewarganegaraan ini, kini kelihatan semakin banyak dikembangkan, baik di negara demokrasi yang sudah maju maupun negara yang sedang merintis atau meningkatkan diri ke arah itu. Hal itu sejalan dengan berkembangnya proses demokratisasi yang kini telah menjadi gerakan sosial-politik dan sosial-budaya yang mendunia.

Menyimak perkembangan studi sosial secara umum dan Pendidikan IPS di Indonesia sampai saat ini maka perlu adanya reorientasi pendidikan IPS sebagai berikut.

1. Menegaskan kembali visi pendidikan IPS sebagai program pendidikan yang menitikberatkan pada pengembangan individu siswa sebagai "*aktor sosial*" yang mampu mengambil keputusan yang bernalar dan sebagai "*warga negara yang cerdas, memiliki komitmen, bertanggung jawab, dan partisipatif*".
2. Menegaskan kembali misi pendidikan IPS untuk memanfaatkan konsep, prinsip dan metode ilmu-ilmu sosial dan bidang keilmuan lain untuk mengembangkan karakter aktor sosial dan warga negara Indonesia yang cerdas dan baik.
3. memantapkan kembali tradisi pendidikan IPS sebagai pendidikan kewarganegaraan yang diwadahi oleh mata pelajaran Kewarganegaraan dan sebagai pendidikan sosial yang diwadahi oleh mata pelajaran IPS terpadu dan mata pelajaran IPS terpisah.
4. Menata kembali sarana programatik pendidikan IPS untuk berbagai jenjang pendidikan (Kurikulum, Satuan Pelajaran, dan Buku Teks) sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan IPS.
5. Menata kembali sistem pengadaan dan penyegaran guru pendidikan IPS sehingga dapat dihasilkan calon guru dan guru pendidikan IPS yang profesional.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Secara historis epistemologis terdapat kesulitan untuk menelusuri perkembangan pemikiran PIPS di Indonesia. Jelaskan mengapa?
- 2) Coba Anda jelaskan tentang pertama kali munculnya istilah IPS menurut Winataputra!
- 3) Perkembangan pemikiran pendidikan IPS yang tertuang dalam, kurikulum sampai dengan tahun 1990-an, pendidikan IPS di Indonesia disajikan dalam dua tradisi. Tunjukkan dan jelaskan!
- 4) Mengapa kurikulum PPSP dianggap sebagai pilar dalam perkembangan pemikiran pendidikan IPS?
- 5) Coba Anda bandingkan perbedaan antara tujuan mata pelajaran ekonomi dengan tujuan program IPS mata pelajaran ekonomi!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Ada dua alasan epistemologis mengapa terdapat kesulitan untuk menelusuri perkembangan pemikiran PIPS di Indonesia.
 - a) Di Indonesia belum ada lembaga profesional bidang pendidikan IPS setua dan sekuat NCSS pengaruhnya HISPIPSI yang dianggap lembaga serupa dengan NCSS di Indonesia usianya masih muda dan produktivitas akademiknya masih sangat terbatas;
 - b) Perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan (disiplin) IPS sangat tergantung pada pemikiran individual atau kelompok pakar yang ditugasi secara insidental.
- 2) Pertama kalinya muncul istilah IPS yaitu pada saat Seminar Nasional tentang “Civic Education” di Tawangmangu 1972. Ada tiga istilah IPS yang muncul secara bertukar pakai yaitu:
 - a) Pengetahuan sosial;
 - b) Studi sosial;
 - c) Ilmu Pengetahuan Sosial.
- 3) Pendidikan IPS di Indonesia disajikan dalam dua tradisi: pertama, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi “citizenship transmission” dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Nasional; kedua, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi “social science” dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMU, yang terkonfederasi di SLTP, dan yang terintegrasi di SD.

- 4) Kurikulum PPSP dianggap sebagai pilar dalam perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS, yakni masuknya kesepakatan akademis tentang pendidikan IPS ke dalam kurikulum sekolah. Pada tahap ini, konsep pendidikan IPS diwujudkan dalam tiga bentuk, yaitu:
 - a) pendidikan IPS terintegrasi dengan nama pendidikan Kewargaan Negara Studi Sosial;
 - b) pendidikan IPS terpisah, di mana istilah IPS hanya digunakan sebagai konsep payung untuk mata pelajaran geografi, sejarah dan ekonomi;
 - c) pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus dalam konsep tradisi studi sosial termasuk tradisi *citizenship transmission*;
 - d) konsep pendidikan IPS memberikan inspirasi terhadap kurikulum 1975 yang diadopsi dari hasil inovasi yang dicobakan melalui kurikulum PPSP;
- 5)
 - a) tujuan mata pelajaran ekonomi adalah memberikan pengetahuan konsep-konsep dan teori sederhana dan menerapkannya dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya secara kritis dan objektif; dan
 - b) tujuan program IPS mata pelajaran ekonomi adalah memberikan bekal kepada siswa mengenal beberapa konsep dan teori ekonomi sederhana untuk menjelaskan fakta, peristiwa, dan masalah ekonomi yang dihadapi.



Rangkuman

Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran studi sosial di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu seperti dapat disimak dari berbagai karya akademis yang antara lain dipublikasikan oleh *National Council for the Social Studies* (NCSS).

Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972-1973, yakni dalam Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Dalam Kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah “Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial” sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Dalam Kurikulum tersebut digunakan istilah Pendidikan Kewargaan negara yang di dalamnya tercakup Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, dan *Civics* yang diartikan sebagai Pengetahuan Kewargaan Negara.

Dalam Kurikulum 1975 pendidikan IPS menampilkan empat profil, yakni: (1) Pendidikan Moral Pancasila menggantikan Pendidikan Kewargaan Negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mawadahi tradisi “*citizenship transmission*”; (2) pendidikan IPS terpadu untuk Sekolah Dasar; (3) pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi; dan (4) pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA, atau sejarah dan geografi untuk SPG.

Bila disimak dari perkembangan pemikiran pendidikan IPS yang terwujud dalam kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an ini, pendidikan IPS di Indonesia

mempunyai dua konsep pendidikan IPS, yakni: *pertama*, pendidikan LPS yang diajarkan dalam tradisi “*citizenship transmission*” dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Nasional; *kedua*, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi “*social science*” dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMU, yang terkonfederasi di SLTP, dan yang terintegrasi di SD.

Dilihat dari perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia, sampai saat ini pendidikan IPS terpilah dalam dua arah, yakni: *pertama*, PIPS untuk dunia persekolahan yang pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial, dan humaniora, yang diorganisasikan secara psiko-pedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan; dan *kedua*, PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS yang pada dasarnya merupakan penyeleksian dan pengorganisasian secara ilmiah dan meta psiko-pedagogis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan disiplin lain yang relevan, untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS. PIPS merupakan salah satu *contents* dalam PDIPS.



Tes Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) *National Council of the the on Social Studies* (NCSS) adalah lembaga profesional di AS yang mengkaji bidang
 - A. pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
 - B. pendidikan ilmu sosial
 - C. ilmu sosial
 - D. pengetahuan sosial.
- 2) Lembaga profesional di Indonesia yang mirip NCSS adalah
 - A. HISPIPSI
 - B. PGRI
 - C. ISPI
 - D. PDIPS
- 3) Berikut ini adalah istilah yang muncul yang digunakan secara bertukar pakai dalam suatu Seminar Nasional di Tawangmangu, Solo 1972, dalam memberikan label mata pelajaran pendidikan ilmu sosial di tingkat persekolahan, *kecuali*
 - A. pengetahuan sosial
 - B. studi sosial
 - C. ilmu pengetahuan sosial
 - D. ilmu-ilmu sosial
- 4) Inovasi yang diujicobakan melalui kurikulum PPSP, hasilnya banyak memberikan inspirasi tentang konsep IPS dalam kurikulum
 - A. 1968
 - B. 1975

- C. 1984
D. 1994
- 5) PMP mengganti PKN sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi *citizenship transmission*, hal ini terakomodasi pada kurikulum
A. 1968
B. 1975
C. 1984
D. 1994
- 6) Pendidikan IPS di SLTP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah dan ekonomi koperasi, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan IPS di SLTP dilaksanakan secara
A. terkonfederasi
B. terintegrasi
C. terpisah
D. tersendiri
- 7) Berikut ini adalah tampilan kurikulum 1975 pendidikan IPS, *kecuali*
A. PMP mengganti PKN
B. Pendidikan IPS di SD secara terintegrasi
C. Pendidikan IPS di SLTP terkonfederasi
D. Pendidikan IPS di SLTA terakomodasi
- 8) Pengajaran IPS di sekolah cenderung menitikberatkan pada penguasaan hafalan, proses pembelajaran yang terpusat pada guru, dan terjadinya banyak miskonsepsi. Pendapat tersebut disampaikan oleh
A. Ahmad Sanusi
B. Nu'man Somantri
C. Sarwono Prawirohardjo
D. Udin S. Winataputra
- 9) Menurut Wilarjo, suatu disiplin ilmu tidak bisa dipandang hanya sebagai akumulasi informasi, fakta, teori atau paradigma, melainkan merupakan sistem
A. bertindak
B. berperilaku
C. berpikir
D. bersikap

- 10) Bila Anda seorang guru mata pelajaran IPS di SLTP maka Anda dituntut ...
- A. integratif
 - B. akomodatif
 - C. konfederatif
 - D. terpisah-pisah

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D. Pengetahuan pendidikan sosial.
- 2) A. Fakultas PIPS.
- 3) A. *Social Studies*.
- 4) A. Akademik.
- 5) A. Pendidikan.
- 6) D. *Social pedagogic*.
- 7) A. Welton dan Mallan.
- 8) A. *A cross disciplines*.
- 9) A. Ilmu-ilmu sosial.
- 10) A. *Education*.

Tes Formatif 2

- 1) A. Bidang PIPS.
- 2) A. HIPIPSI.
- 3) D. IIS.
- 4) B. 1975.
- 5) B. 1975.
- 6) A. Terkonfederasi.
- 7) D. Pendidikan IPS di SLTA terakomodasi.
- 8) A. Ahmad Sanusi.
- 9) C. Sistem berpikir.
- 10) D. Terpisah-pisah.

Daftar Pustaka

- Barber, B. R. (1989). *Public Talk and Civic Action : Education for Participation in a Strong Democracy in Rauner, M., (1999), Civic Education : An Annofaled Bibliography, CIVNET.*
- Capra, F. (1998). *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan.* Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Dahlan, M. A. (1997). *Pendidikan IPS sebagai Upaya Strategis pembangunan manusia Seutuhnya untuk Menghadapi Era Globalisasi.* Jakarta: Panitia Sarasehan dan Forum Komunikasi Pimpinan FPIPS-JPIPS se Indonesia VIII.
- Departemen P dan K. (1968a). *Kurikulum Sekolah Dasar.* Jakarta.
- Gandal, M., Finn, Jr. C. E. (1992). *Freedom Papers: Teaching Democracy,* USA: United States Information Agency.
- Hartoonian, H. M. (1992). *The Social Studies and Project 2061: An Opportunities for Harmony,* dalam *The Social Studies,* 83; 4; 160-163.
- Huntington, S.P. (1991). *Gelombang Demokratisasi Ketiga,* terjemahan dari *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- NCSS. (1989). *Charting A Course: Social Studies for the 21st Century.* Washington: National Commission on Social Studies in the Schools.
- NCSS. (1992). *In Search of a Scope and Sequence for Social Studies dalam Social Education,* 48; 4; 249-264.
- _____. (1989). *Undang-undang No. 2/1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta.
- Soedijarto. (1993). *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Somantri, N. (1969). *Pelajaran Kewargaan Negara di Sekolah.* Bandung: IKIP Bandung.
- Tsauri, H.S. (1997). *Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Manusia Indonesia Seutuhnya dalam Perspektif Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*

di Indonesia. Jakarta: Panitia Seminar dan Forum Komunikasi VII Pimpinan FPIPS-IKIP dan JPIPS-FKIP se Indonesia.

Winataputra, U.S. (1978). *A Pilot Study of The Implementation of The SMA PMP Curriculum in Bandung Area*. Sydney: Macquarie University (MA.Thesis).